

**ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA, PENDIDIKAN, POPULASI PENDUDUK, DAN
PENGANGGURAN TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2010-2015**



SKRIPSI

OLEH:

FERGIAWAN AVRIANDARU

NIM. 13810125

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

**ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA, PENDIDIKAN, POPULASI PENDUDUK, DAN
PENGANGGURAN TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2010-2015**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

OLEH:

FERGIAWAN AVRIANDARU
NIM. 13810125

PEMBIMBING:

Dr. MISNEN ARDIANSYAH, S.E., M.SI., AK., CA

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan suatu negara, selain harus mengejar pertumbuhan ekonomi juga harus mengejar pemerataan dalam distribusi pendapatan atau menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan di dalam masyarakat. Terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik ekonomi maupun non ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2015.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan berupa *crosssection* 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan *time series* selama periode 2010-2015. Data diolah dengan analisis data panel dengan regresi *fixed effect model*.

Hasil penelitian menunjukkan seluruh variabel penelitian berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Secara parsial variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan variabel PDRB, populasi penduduk, dan pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci: Ketimpangan Distribusi Pendapatan, PDRB, IPM, Pendidikan, Populasi Penduduk, dan Pengangguran.

ABSTRACT

In increasing the success of a Country's Development, besides having to pursue economic growth also must pursue equity in the distribution of income or decrease inequality income distribution in society. The occurrence of income distribution inequality can be influenced by various factors, both economic and non-economic. This study aims to analyze what factors affect the inequality income distribution in Central Java Province 2010-2015 period.

This research is a quantitative research. Data used are crosssection 35 districts / cities in Central Java Province and time series during the period 2010-2015. Data is processed by panel data analysis with fixed effect model regression.

The results showed that all research variables simultaneously affect income income inequality. Partially Human Development Index (HDI) variable have positive and significant influence to income distribution inequality and education variable have negative and significant effect to income distribution inequality. Gross Regional Domestic Product (GRDP), population, and unemployment have no effect to income distribution inequality in Central Java Province.

Keywords: Inequality Income Distribution, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Human Development Index (HDI) , Education, Population Population, and Unemployment.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fergiawan Avriandaru

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fergiawan Avriandaru

NIM : 13810125

Judul Skripsi : **“Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Pendidikan, Populasi Penduduk, dan Pengangguran terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2015”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk ini kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 April 2018

Pembimbing

Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.SI., AK., CA

NIP. 19710929 200003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1999,1/Un.02/DEB/PP.01.1/07/2018

Tugas Akhir dengan judul : **ANALISIS PENGARUH PDRB, IPM, PENDIDIKAN, POPULASI PENDUDUK, DAN PENGANGGURAN TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2010-2015**

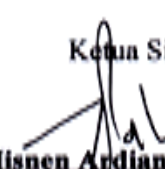
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **FERGIWAN AVRIANDARU**
Nomor Induk Mahasiswa : **13810125**
Telah diujikan pada : **Selasa, 10 Juli 2018**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Misnen Ardiansyah, SE., M.Si.
NIP. 19710929 200003 1 001

Penguji I


Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 19631014 199203 1 002

Penguji II


Miftakhul Choiri, S.Sos.I, M.Si.
NIP. 19821009 201503 1 003

Yogyakarta, 10 Juli 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

DEKAN



Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fergawan Avriandaru
NIM : 13810125
Prodi/Fakultas : Ekonomi Syari'ah/ Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Pendidikan, Populasi Penduduk, dan Pengangguran terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2015"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi, dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 April 2018

Penyusun



Fergawan Avriandaru

NIM. 13810125

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fergiawan Avriandaru
NIM : 13810125
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PENDIDIKAN, POPULASI PENDUDUK, DAN PENGANGGURAN TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2010-2015"

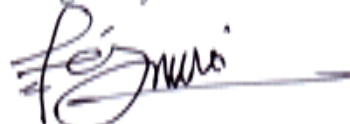
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/fotmatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada Tanggal: 18 Juli 2018

Yang menyatakan



(FERGIAWAN AVRIANDARU)

HALAMAN MOTTO

“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan, dan saya percaya pada diri saya sendiri”

-Muhammad Ali-

“Hanya mereka yang berani gagal dapat meraih keberhasilan”

-Robert F. Kennedy-

“Bersyukur bukan hanya sebatas ucapan Alhamdulillah. Bersyukur adalah sikap. Itu adalah gaya hidup. Itu adalah cara berpikir. Teruslah bersyukur.”

- Nouman Ali Khan-

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya Sederhana Ini Saya Persembahkan Kepada (Alm)
Ayahanda, Ibunda, Kakak Dan Adik-Adik Tercinta, Serta
Almamaterku Tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penyusun, sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam tidak lupa saya panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya dan mendapatkan syafaatnya di *yaumul kiyamah*. Amin.

Penelitian ini merupakan akhir pada Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Proses penelitian skripsi ini bukan tidak ada hambatan, melainkan penuh dengan liku-liku yang membuat penyusun harus bekerja keras dalam mengumpulkan data-data yang sesuai dengan maksud dan tujuan melakukan penelitian.

Skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik dan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak, baik dari pembimbing materi maupun teknis. Untuk itu perkenankan penyusun menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ayahanda (Alm) Hartono, Ibunda Boiyem, Kakakku Novian Hasfi serta Adik-adikku Banu Anggi dan Windya Ari Agustina yang selalu memotivasi penyusun.
2. Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta jajarannya.
4. Sunaryati, SE., M.Si. selaku Kaprodi Ekonomi Syari'ah.

5. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.SI., AK., CA sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi masukan dengan penuh kesabaran kepada penyusun.
6. Teman seperjuangan Prodi Ekonomi Syari'ah 2013 khususnya EKSA (C) yang telah banyak membantu penyusun.
7. Teman-teman KKN angkatan ke-90 kelompok 16, Bana, Dien, Eriz, Khamid, Nayah, Pika, Tari, dan Yusron yang telah banyak memberi pelajaran hidup bagi penyusun.
8. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan tugas akhir serta dalam menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diberi balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya serta bagi para pembaca pada umumnya.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 April 2018

Penyusun



Fergawan Avriandaru
NIM. 13810125

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Tsa'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	W
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta'marbutah*

Semua *ta'marbutah* ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata selain “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ----- -	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
-----ِ----- -	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
-----ُ----- -	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	Ditulis	<i>fa’ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>zukira</i>
ذهب	Dammah	Ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	ditulis	<i>A</i>
جاهلية	ditulis	<i>jahilliyah</i>
2. Fathah + ya' mati	ditulis	<i>A</i>
تنسى	ditulis	<i>tansa</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>I</i>
كريم	ditulis	<i>karim</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>U</i>
فروض	ditulis	<i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2. Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*, maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
1.4 Sistematika Pembahasan.....	16
 BAB II KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	
2.1 Landasan Teori.....	19
2.1.1 Pembangunan Ekonomi.....	19
2.1.2 Distribusi Pendapatan.....	21
2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	26
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	29
2.1.5 Pendidikan	33
2.1.6 Populasi Penduduk	34
2.1.7 Pengangguran.....	35
2.1.8 Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam	40
2.1.9 Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Islam	43
2.1.10 Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam.....	47
2.1.11 IPM dalam Perspektif Islam	51
2.1.12 Pendidikan dalam Perspektif Islam.....	54
2.1.13 Populasi Penduduk dalam Perspektif Islam.....	59

2.1.14 Pengangguran dalam Perspektif Islam	60
2.2 Telaah Pustaka	62
2.3 Kerangka Pemikiran	66
2.4 Pengembangan Hipotesis	69
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	78
3.2 Populasi dan Sampel.....	78
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	79
3.4 Data dan Jenis Data	85
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	87
3.6 Metode Analisis.....	87
3.7 Teknik Analisis Data	91
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Profil Provinsi Jawa Tengah	95
4.2 Deskripsi Data Penelitian.....	109
4.3 Analisis Data	110
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	118
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	152
5.2 Saran	154
DAFTAR PUSTAKA.....	156
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Indeks Gini di Seluruh provinsi di Pulau Jawa periode tahun 2010-2015.....	3
Tabel 1.2 Rata-rata laju PDRB ADHK 2010 (persen) dan rata-rata Indeks Gini menurut provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2015	5
Tabel 1.3 Rata-rata Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Gini di seluruh provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2015	8
Tabel 1.4 Rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA dan Indeks Gini seluruh provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2015	10
Tabel 3.1 Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum IPM	88
Tabel 4.1 PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Juta Rupah) 2010-2015	100
Tabel 4.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (persen) periode 2010-2015	101
Tabel 4.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (persen) periode 2010-2015	105
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif.....	109
Tabel 4.5 Uji Likelihood Ratio.....	111
Tabel 4.6 Uji Hausman	118
Tabel 4.7 Estimasi Fixed Effect Model	112
Tabel 4.8 Persentase kontribusi terhadap jumlah PDRB seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (persen) tahun 2013-2015.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 PDRB ADHK 2010 (Juta Rupiah) dan Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015	6
Gambar 1.2 Perbandingan jumlah penduduk dan Indeks Gini di seluruh provinsi di Pulau Jawa tahun 2015.....	12
Gambar 1.3 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Gini di seluruh provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2015	13
Gambar 2.1 Kurva Lorenz.....	23
Gambar 2.2 Kurva “U” Terbalik Kuznets.....	25
Gambar 2.3 Dimensi-dimensi dalam IPM	30
Gambar 2.4 Istilah Ketenagakerjaan.....	38
Gambar 2.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam	50
Gambar 2.6 Bagan kerangka pemikiran.....	67
Gambar 4.1 Peta wilayah Provinsi Jawa Tengah	96
Gambar 4.2 Indeks Gini menurut Kabupaten/Kota tahun 2015	97
Gambar 4.3 Perkembangan PDRB di Jawa Tengah tahun 2010-2015 baik ADHK atau ADHB 2010.....	99
Gambar 4.4 Perkembangan IPM Jawa Tengah periode 2010-2015	104
Gambar 4.5 Populasi Penduduk Jawa Tengah periode 2010-2015	107
Gambar 4.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah 2010-2015.....	108
Gambar 4.7 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Jawa Tengah tahun 2010-2015.....	126
Gamabr 4.8 Perbandingan Piramida Penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 dan tahun 2015	126

Gambar 4.9 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah 2010-2015.....	132
Gambar 4.10 Rasio Ketergantungan Total, Usia Tua (65+) dan Usia Muda (0-14) dari tahun 1971-2035	137
Gambar 4.11 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) dan Indeks Gini di Jawa Tengah periode 2010-2015	145

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya (Arsyad, 2015: 11). Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai pembangunan kemakmuran ekonomi negara atau daerah guna kesejahteraan penduduknya (Huda, *dkk.*, 2015: 1). Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar pada struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial di samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan serta pemberantasan kemiskinan (Todaro, 1997: 17).

Menurut Rubiarko (2013) dalam sebuah pembangunan ekonomi, harus terdapat suatu proses pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pemerataan ekonomi akan memperlebar jurang pemisah antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sementara jika pemerataan ekonomi tanpa pertumbuhan sama halnya akan meningkatkan kemiskinan suatu daerah. Dan seharusnya dalam proses pembangunan ekonomi, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi harus dicapai secara bersamaan. Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi)

dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak Negara Berkembang, tidak terkecuali Indonesia (Tambunan, 2011: 181). Jadi, masalah perbedaan pendapatan antara individu paling kaya dengan pendapatan individu paling miskin serta masalah kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi di negara Indonesia ini.

Menurut Huda *dkk* (2015: 10-11) diharapkan paradigma pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan (*growth*), melainkan juga melihat ukuran pemerataan dalam *distribution*. Kesenjangan merupakan salah satu persoalan dalam paradigma pembangunan ekonomi di berbagai negara khususnya Indonesia sebagai negara berkembang. Munculnya kesenjangan ekonomi akan menimbulkan banyak masalah lain yang bermunculan, seperti penduduk miskin bertambah, pengangguran meningkat, tingkat kejahatan meningkat, kualitas pendidikan menurun, kemampuan daya beli masyarakat menurun.

Menurut BPS Jawa Tengah (2016) salah satu cara yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan yaitu dengan menggunakan Indeks Gini. Bila Indeks Gini mempunyai nilai sama dengan 0 (nol) berarti terdapat “kemerataan sempurna”, namun jika Indeks Gini sama dengan 1 (satu) maka terjadi “ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna”. Intinya, semakin tinggi nilai Indeks Gini maka semakin timpang distribusi pendapatan suatu negara. Sebaliknya, semakin rendah nilai Indeks Gini semakin merata distribusi pendapatannya. Oshima (dalam BPS Jawa Tengah, 2016) menetapkan sebuah

kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Ketimpangan taraf rendah bila Indeks Gini $< 0,35$, ketimpangan taraf sedang bila Indeks Gini antara $0,35-0,5$ dan ketimpangan taraf tinggi bila Indeks Gini $> 0,5$.

Masalah disparitas pendapatan telah lama menjadi persoalan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah negara miskin dan berkembang (Arsyad, 1988 dalam Rubiarko, 2013). Pada tabel 1.1 akan memperlihatkan bagaimana kondisi ketimpangan dalam distribusi pendapatan di seluruh provinsi yang ada Pulau Jawa. Dimana ketidakmerataan atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan tersebut diukur dengan Indeks Gini dari tahun 2010-2015.

Tabel 1.1
Perkembangan Indeks Gini di seluruh Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2015

Provinsi	Indeks Gini					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DKI JAKARTA	0.36	0.44	0.42	0.43	0.43	0.43
JAWA BARAT	0.36	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
JAWA TENGAH	0.34	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38
DI YOGYAKARTA	0.41	0.40	0.43	0.44	0.42	0.43
JAWA TIMUR	0.34	0.37	0.36	0.36	0.37	0.42
BANTEN	0.42	0.40	0.39	0.40	0.40	0.40

Sumber: BPS Indonesia.

Jika dilihat dari tabel 1.1 di atas, Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah terjadi tren peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan 2013 dari 0,34 menjadi 0,39.

Setelah itu mengalami penurunan menjadi angka 0,38 sampai tahun 2015. Walaupun begitu, dari semua provinsi yang ada di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah memiliki angka Indeks Gini yang paling rendah pada tahun 2015.

Selama proses awal pembangunan terjadi suatu dilema yaitu antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan, ini menjadi masalah yang telah lama dan harus dihadapi oleh negara-negara miskin dan berkembang. Kuznets yang berjasa besar dalam mempelopori analisis pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju, telah mengemukakan bahwa pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik. Observasi inilah yang lalu dikenal secara luas sebagai kurva Kuznets “U-terbalik”. Konsep tersebut memperoleh namanya dari bentuk rangkaian perubahan longitudinal (antarwaktu) atas distribusi pendapatan (yang diukur berdasarkan koefisien Gini) sejalan dengan pertumbuhan GNP per kapita (Todaro, 2000: 174). Teori tersebut pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili (2016), Iswanto (2015), Lestari (2015), Pradnyadewi (2017) dan Setiyono menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Tambunan, 2011: 40).

Keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Secara sederhana pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah dari tahun ke tahun (Iswanto, 2015). Pada tabel 1.2 akan memperlihatkan rata-rata laju PDRB atas dasar harga konstan 2010 di seluruh provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2010-2015 dan rata-rata Indeks Gini tahun 2010-2015.

Tabel 1.2
Rata-rata Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (persen) dan Rata-rata Indeks Gini Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2015

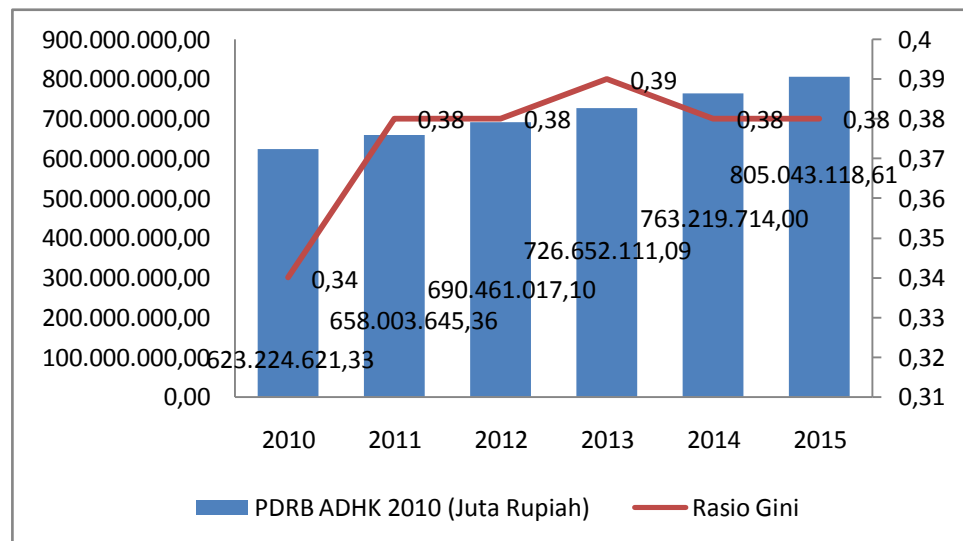
Provinsi	Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB tahun 2010-2015 (persen)	Rata-rata Indeks Gini 2010-2015
DKI JAKARTA	6,16	0,42
JAWA BARAT	5,86	0,40
JAWA TENGAH	5,30	0,37
DI YOGYAKARTA	5,20	0,42
JAWA TIMUR	6,00	0,37
BANTEN	6,12	0,40

Sumber: BPS Indonesia.

Dari tabel 1.2 di atas, memperlihatkan bagaimana perbandingan rata-rata laju pertumbuhan PDRB dan rata-rata Indeks Gini seluruh provinsi di Pulau Jawa selama periode tahun 2010-2015. Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat kelima atau kedua terbawah dari rata-rata pertumbuhan PDRB seluruh provinsi di Pulau Jawa. Rata-rata pertumbuhan PDRB tertinggi adalah Provinsi DKI

Jakarta dengan 6,16 %, kemudian diikuti Provinsi Banten 6,12 %, Jawa Timur 6,00 %, Jawa Barat 5,86 %, Jawa Tengah 5,30 %, dan DIY 5,20 %.

Walaupun demikian, dengan angka laju PDRB yang rendah, akan tetapi dari semua provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah memiliki Indeks Gini yang rendah pula. Angka Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah dalam perkembangannya cenderung terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2010-2015. Dari angka 0,34 pada tahun 2010 menjadi 0,38 pada tahun 2015. Dan jika dilihat dari angka PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dari tahun 2010-2015 di Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dalam gambar 1.1.



Sumber: BPS Jawa Tengah, data diolah.

Gambar 1.1
PDRB ADHK 2010 (Juta Rupiah) dan Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah
tahun 2010-2015

Dari penggambaran gambar 1.1 dapat dikatakan bahwa dalam periode tahun 2010-2015, di perekonomian Jawa Tengah terjadi pola hubungan yang bersifat positif antara peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan masyarakat. Artinya, ketika perekonomian mengalami peningkatan maka tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat juga meningkat.

Selanjutnya, dimensi tujuan pembangunan menjelaskan bagaimana tahapan evolusi pengukuran ekonomi pembangunan, dari awal kemunculan teori ekonomi pembangunan yang mengukur terjadinya pembangunan dilihat dari tingkat output melalui Produk Domestik Bruto (PDB) berkembang menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Kuncoro, 2010: 5). Menurut UNDP (*United Nation Development Programme*) tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (dalam BPS, 2016). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hartini (2017), mengatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini terjadi karena nilai IPM yang tinggi mengindikasikan pembangunan manusia yang baik, salah satunya pendidikan, dimana pendidikan formal yang semakin tinggi akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Dan hal tersebut diharapkan dapat mengurangi angka ketimpangan pendapatan yang ada.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2015, pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa pemerataan IPM di Pulau Jawa terdapat perbedaan IPM antar provinsi. Provinsi DKI Jakarta ada di posisi teratas dengan rata-rata IPM tahun 2010-2015 sebesar 77,71 diikuti DIY sebesar 76,38, kemudian Banten sebesar 69,05, Jawa Barat sebesar 67,78, Jawa Tengah 67,70, dan terakhir Jawa Timur sebesar 67,13. Dengan kata lain, walau angka IPM Provinsi Jawa Tengah masih tergolong dalam IPM sedang, namun jika dibandingkan dengan angka IPM provinsi lain, rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah berada di urutan lima dari enam provinsi yang ada.

Tabel 1.3
Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Gini di Seluruh
Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2015

Provinsi	Rata-rata IPM tahun 2010-2015	Rata-rata Indeks Gini 2010-2015
DKI JAKARTA	77,71	0,42
JAWA BARAT	67,78	0,40
JAWA TENGAH	67,7	0,37
DI YOGYAKARTA	76,38	0,42
JAWA TIMUR	67,13	0,37
BANTEN	69,05	0,40

Sumber: BPS Indonesia, data diolah.

Dari tabel 1.3 dengan jelas diperlihatkan bahwa dari ke-enam provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah hanya menempati posisi ke-lima angka rata-rata IPM tahun 2010-2015. Walaupun begitu, dari semua provinsi di Pulau Jawa tersebut, Jawa Tengah justru memiliki angka Indeks Gini yang terbilang rendah dari provinsi lain.

Menurut BPS (2015), sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan, penduduk dituntut berperan aktif dalam mendorong kemajuan pembangunan. Untuk itu partisipasi aktif penduduk sangat dibutuhkan, mengingat tanpa dukungan penduduk maka pembangunan tidak akan mencapai hasil yang optimal dan keberhasilan yang dicapai tidak dapat dinikmati secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Disadari, mendorong penduduk untuk berperan aktif dalam pembangunan tidak mudah karena masih terkendala oleh kemampuan dan kompetensi yang dimiliki penduduk. Salah satu upaya yang efektif untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi penduduk adalah melalui pendidikan. Menurut Prasetyo (2016) bahwa asumsi dasar teori *Human Capital* adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah, dapat berarti bahwa di satu pihak dapat meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Dengan meningkatnya angka pendidikan yang ada, berarti hal tersebut akan menurunkan angka ketimpangan pendapatan yang ada di masyarakat karena akan berpengaruh pada penghasilan serta keterampilan dalam bekerja. Penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah (2010) dan Nuraini (2017) yang menyatakan bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap disparitas pendapatan adalah signifikan dan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi menjamin adanya pemerataan distribusi pendapatan.

Sedang untuk melihat pemerataan pendidikan dapat menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah

siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Misal APK SMA sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SMA dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Tabel 1.4 menggambarkan APK jenjang pendidikan SMA di seluruh provinsi di Pulau Jawa.

Tabel 1.4
Rata-rata Angka Partisipasi Kasar jenjang SMA dan Indeks Gini
seluruh Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2015

Provinsi	Rata-rata APK tahun 2010-2015	Rata-rata IG tahun 2010-2015
DKI JAKARTA	72,47	0,42
JAWA BARAT	61,88	0,40
JAWA TENGAH	68,73	0,37
DI YOGYAKARTA	86,02	0,42
JAWA TIMUR	68,84	0,37
BANTEN	65,69	0,40

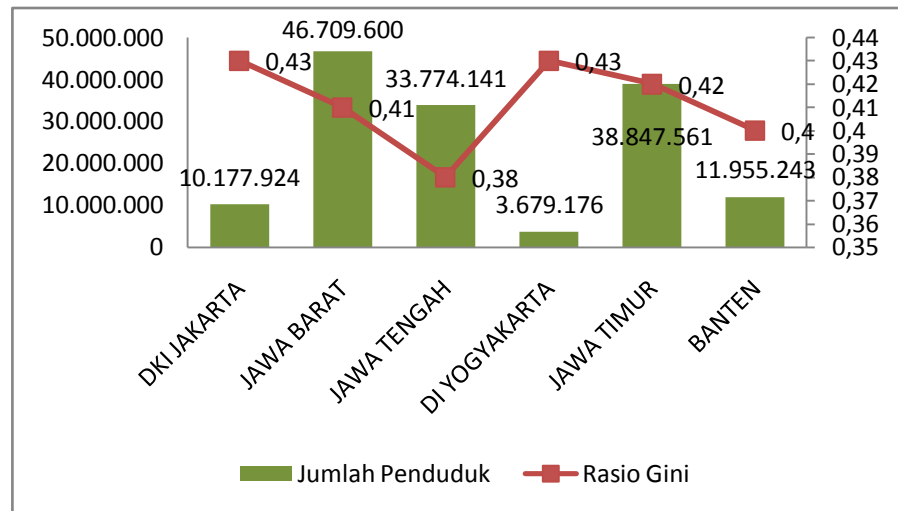
Sumber: BPS Indonesia.

Dari tabel 1.4 dilihat rata-rata APK seluruh provinsi di Pulau Jawa, angka APK Jawa Tengah tergolong rendah karena hanya menempati posisi empat dari enam provinsi yang ada. Jauh tertinggal dari Provinsi DIY, DKI Jakarta dan Jawa Timur yang menempati posisi teratas masing-masing pada angka 86,02%, 72,47%, dan 68,84%. Sedang Jawa Tengah masih berada pada angka 68,73%. Walaupun begitu, dari semua provinsi di Pulau Jawa tersebut, Jawa Tengah justru memiliki angka Indeks Gini yang terbilang rendah dari provinsi lain.

Selain itu, menurut Nurlaili (2016) ada hal lain yang berakibat pada ketimpangan distribusi pendapatan yaitu populasi penduduk dan permasalahan akan muncul ketika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang akan berakibat pada ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan penduduk biasanya memicu timbulnya masalah lain seperti struktur umur muda, jumlah pengangguran yang semakin lama semakin tinggi, urbanisasi dan lain sebagainya. Masalah kependudukan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang, baik dilihat dari sisi antar pulau, antar daerah, maupun daerah pedesaan dan daerah perkotaan, serta antar sektor (Arsyad, 2010: 338-340). Penelitian yang dilakukan oleh Musfidar (2012) dan Nurlaili (2016) yang menyimpulkan bahwa jumlah atau populasi penduduk berpengaruh positif serta signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Untuk Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduknya terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2010-2015. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berjumlah 32.443.886 menjadi 33.774.141 pada tahun 2015. Untuk seluruh provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga setelah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur pada tahun 2015. Jika dilihat dari gambar 1.2, walau dengan jumlah penduduk yang besar pada tahun 2015, namun Provinsi Jawa Tengah

pada tahun yang sama memiliki angka Indeks Gini yang rendah daripada provinsi lain yang ada di Pulau Jawa.



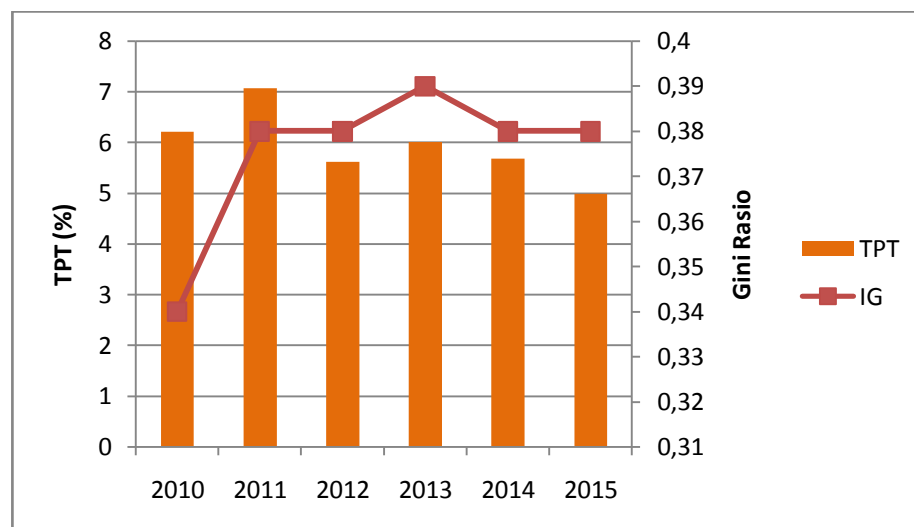
Sumber: BPS Indonesia.

Gambar 1.2
Perbandingan Jumlah Penduduk dan Indeks Gini di Seluruh Provinsi Pulau Jawa tahun 2015

Perkembangan penduduk yang kian bertambah cepat dan jumlahnya yang sangat besar dalam beberapa dasawarsa ini, menimbulkan beberapa masalah baru yang sangat serius. Masalah-masalah tersebut adalah: (a) struktur penduduk yang berat sebelah, yaitu banyaknya penduduk yang berada dibawah umur (dibawah 15 tahun), (b) pengangguran yang bertambah serius, dan (c) arus urbanisasi yang tinggi. Masing-masing masalah ini mempersulit usaha negara berkembang mempercepat proses pembangunan ekonomi (Sukirno, 2006: 86). Masing-masing masalah ini mempersulit usaha negara berkembang mempercepat proses

pembangunan ekonomi. Dan hal tersebut dapat pula menyebabkan ketimpangan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam penelitian Nurlaili (2016) menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif serta signifikan terhadap angka ketimpangan pendapatan. Untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri, persentase pengangguran terbuka dari tahun 2010-2015 berfluktuatif, akan tetapi mulai tahun 2013 hingga 2015 mengalami tren penurunan. Walau angka tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, akan tetapi Indeks Gini di Jawa Tengah mengalami tren kenaikan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 1.3.



Sumber: BPS Jawa Tengah, data diolah.

Gambar 1.3
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Indeks Gini di
Seluruh Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2015

Berdasarkan data dan uraian di atas mengenai pengaruh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan, populasi penduduk serta pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah, maka penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kondisi tersebut, dengan mengambil judul penelitian “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Pendidikan, Populasi Penduduk dan Pengangguran terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2015.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan didapati perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan, populasi penduduk, dan pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Tengah tahun 2010-2015. Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah sebagai berikut.

- a. Apakah variabel PDRB mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015?
- b. Apakah variabel IPM mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015?

- c. Apakah variabel pendidikan mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015?
- d. Apakah variabel populasi penduduk mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015?
- e. Apakah variabel pengangguran mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Tengah tahun 2010-2015.
- b. Mengetahui pengaruh IPM terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Tengah tahun 2010-2015.
- c. Mengetahui pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Tengah tahun 2010-2015.
- d. Mengetahui pengaruh populasi penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Tengah tahun 2010-2015.
- e. Mengetahui pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Tengah tahun 2010-2015.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian teoritis yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan yaitu mengenai analisis pengaruh PDRB, IPM, pendidikan, populasi penduduk, dan pengangguran terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah: Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakakan dalam rangka mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di daerah.
2. Bagi Peneliti: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti serta mengasah daya analisis dalam memecahkan masalah perekonomian terkait dengan ketimpangan distribusi pendapatan.

1.4 Sistematika Pembahasan

Kajian dalam penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari 5 bab pembahasan yang secara keseluruhan saling berkaitan. Sistematika pembahasan merupakan gambaran dari alur pemikiran penyusun dari awal hingga akhir.

Berikut ini penjabaran dari kelima bab tersebut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama ini berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi yang berisi latar belakang masalah mengenai topik yang akan diteliti. Latar belakang masalah menguraikan hal-hal yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Setelah permasalahan yang perlu dilakukan penelitian diuraikan dalam latar belakang, maka disusunlah rumusan masalah. Rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian yang perlu dicari jawabannya. Tujuan penelitian berisi mengenai hal-hal yang ingin dicapai dari penelitian ini. Kegunaan penelitian berisi tentang manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini untuk pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya yaitu sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan berisi tentang uraian singkat dari pembahasan tiap bab dalam penelitian ini.

BAB II: KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini membahas tentang teori-teori yang relevan berkaitan dengan penelitian, yaitu teori PDRB, IPM, pendidikan, populasi, pengangguran dan ketimpangan pendapatan secara umum dan dalam perspektif Islam. Selain itu, dalam bab ini diuraikan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Berdasarkan teori yang relevan serta penelitian terdahulu maka disusunlah pengembangan hipotesis. Poin penting dari bab ini adalah

untuk memperoleh pemahaman serta kerangka yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian serta penjabaran secara operasional. Obyek penelitian berisi tentang jenis penelitian, sumber data, serta teknik analisis data berupa alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini pada permulaannya akan digambarkan secara singkat keadaan geografis, demografis, perekonomian, PDRB, IPM, pendidikan, populasi penduduk, pengangguran serta ketimpangan distribusi pendapatan. Kemudian, bab ini dilanjutkan tentang hasil analisis penelitian dan pembahasan dari pengolahan data. Hasil penelitian adalah jawaban atas seluruh pertanyaan yang telah disebutkan di BAB I.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, implikasi dari penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. Penyusun juga menyampaikan kekurangan penelitian ini untuk melengkapi analisis penelitian dimasa depan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan tentang Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendidikan, Populasi Penduduk, dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2015, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Variabel PDRB berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010-2015. Hal tersebut dikarenakan angka PDRB yang diperoleh antar Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2010-2015 terdapat perbedaan yang mencolok. Terdapat pula kesenjangan atau perbedaan yang sangat mencolok dari beberapa Kabupaten atau Kota dalam kontribusinya dalam menyumbang jumlah PDRB di Provinsi Jawa Tengah.
2. Variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010-2015. Hal tersebut dikarenakan kelompok umur tua yang masuk dalam kategori umur tidak produktif yang semakin bertambah. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan kesehatan yang ada di masyarakat sehingga menyebabkan angka

kematian menurun atau angka harapan hidup masyarakat Jawa Tengah selama periode semakin meningkat. Dan hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya pula ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat.

3. Variabel pendidikan yang diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010-2015. Hal tersebut sesuai dengan asumsi dasar teori *Human Capital* yang menyatakan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah, dapat berarti bahwa di satu pihak dapat meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Hal tersebut didukung dengan data yang memperlihatkan bahwa angka APK Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010-2015 selalu mengalami kenaikan persentase.
4. Variabel populasi penduduk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010-2015. Hal tersebut dikarenakan kenaikan jumlah atau populasi penduduk selama periode 2010-2015 tidak diikuti dengan kenaikan angka pengangguran, justru angka pengangguran mengalami tren penurunan. Selain itu, selama periode 2011-2015 yang masuk dalam periode penelitian terjadi bonus demografi dimana usia produktif lebih besar daripada usia non-produktif. Dan hal tersebutlah yang menyebabkan pengaruh populasi atau jumlah penduduk tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Tengah.

5. Variabel pengangguran yang diukur dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010-2015. Hal tersebut terjadi karena perbedaan yang mencolok antar Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah dalam angka persentase penganggurannya. Selama periode 2010-2015 angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan. Hal lain yang menyebabkan tidak signifikan sesuai teori yang menyebutkan bahwa tidak semua orang yang tidak bekerja (pengangguran) itu pasti miskin dan tidak semua yang punya pekerjaan permanen selalu memiliki penghasilan yang tinggi. Selalu saja ditemukan pengangguran sukarela di setiap masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, penelitian ini memiliki saran-saran sebagai berikut.

1. Dalam proses pembangunan ekonomi daerah, pemerintah selain mengejar laju pertumbuhan ekonomi, diharapkan pula ada pemerataan pendapatan yang ada di masyarakat. Hasil analisis menunjukkan jika variabel yang menyebabkan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah positif dan signifikan yaitu IPM. Walaupun angka harapan hidup Provinsi Jawa Tengah tergolong baik dan selalu mengalami kenaikan, akan tetapi masih ada komponen lain dalam membentuk IPM, yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan daya beli masyarakat. Jadi pemerintah juga harus meningkatkan komponen-

komponen tersebut. Selain itu, program-program pemerintah dalam meningkatkan IPM sebaiknya ditinjau ulang apakah sudah tepat sasaran atau belum. Dalam upaya peningkatan IPM sebaiknya difokuskan pada masyarakat dan daerah-daerah yang membutuhkan. Jadi, solusi paling utama untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah adalah dengan meningkatkan dimensi pengetahuan dan standar hidup layak masyarakat serta memeratakannya.

2. Capaian angka PDRB, IPM, tingkat pendidikan, populasi penduduk, serta tingkat pengangguran secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Tengah. Sehingga pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi terkait dengan lima hal tersebut. Hal tersebut bertujuan supaya program-program ataupun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi angka ketimpangan pendapatan yang ada di masyarakat dapat tepat sasaran dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrul R, Dyah W. Sari, Rahmat H. Setianto, Martha R. Primanti. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arifianto, Wildan dan Imam Setiyono. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia”. *Jurnal*. Universitas Negeri Surabaya.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Arsyad, Lincolin. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Edisi 5.
- Astuti, Riska Dwi. 2015. “Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2005-2013”. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Angka Partisipasi Kasar Masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Beberapa Indikator Sosial Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Edisi Juli 2017*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Booklet Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Indeks Pembangunan Manusia Masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Jumlah Penduduk Masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *PDRB Pengeluaran Jawa Tengah 2014*. BPS Provinsi Jawa Tengah.

- Badan Pusat Statistik. 2015. *Pemerataan pendapatan dan pola konsumsi penduduk Jawa Tengah 2015*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Profil Penduduk Jawa Tengah Hasil Supas 2015*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2010*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2011*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2012*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2013*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2014*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2015*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2016*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat statistik. 2016. *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2016*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2017*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat statistik. 2016. *Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah 2016*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Tingkat Pengangguran Terbuka Masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Boediono. 2005. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Daradjat, Zakiah, dkk. 2012. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. 10. Jakarta: Bumi Aksara.

- Doddy, Moch. 2012. *Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Fadilla, Lia Maharani. 2009. “Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Pemekaran di Sumatra Utara”. *Skripsi*. Universitas Sumatra Utara.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari’ah*. Jakarta: Kencana.
- Gujarati, Damodar N. 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba empat.
- Hanafi. 2012. “Sistem Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal*. STAI Attanwir Bojonegoro.
- Hariadi, Pramono, dkk. “Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah”. *Jurnal*. Univesitas Jenderal Soedirman.
- Harmadi, Sony Harry B. 2014. *Pengantar Ekonomi Makro*. Banten: Universitas Terbuka.
- Hartini, Nita Tri. 2017. “Pengaruh PDRB Per kapita, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2015”. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Huda, Nurul, dkk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenadamedia.
- Iswanto, Denny. 2015. “Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur”. *Jurnal*. Yayasan Al-Kahfi Kota Tangerang Selatan.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2009. *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: Aku Bisa.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2010. *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Pendidikan, Pembangunan Karakter, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Aku Bisa.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Kushendi dan Suryana. 2007. *Perekonomian indonesia*. Jakarta : Universitas Terbuka.

- Lestari, Susi. 2016. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur tahun 2008-2012". *Jurnal*. Universitas Negeri Jember.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Marimba, Ahmad D. 1986. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Almaarif.
- Munir, Misbahul. 2007. *Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah: Kajian Hadis Nabi dalam Perspektif Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press.
- Muhi, Ali Hanapiah. 2010. "Analisis Investasi Modal Manusia dalam Perspektif Pendidikan dan Pelatihan". *Jurnal*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
- Musfidar, Ma'mun. 2012. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Selatan tahun 2001-2010". *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.
- Naf'an. 2014. *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nanda, Agung Widianarko Eka. 2013. "Analisis Ketimpangan Distribusi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi di Kabupaten Banjarnegara tahun 1990-2010". *Jurnal*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nangarumba, Muara. 2015. "Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2005-2014". *Jurnal*. Universitas Brawijaya.
- Nuraini, Emi. 2017. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pendidikan terhadap Disparitas Pendapatan di Wilayah Gerbangkertosusila". *Jurnal*. Universitas Negeri Surabaya.
- Nurlaili, Ani. 2016. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa tahun 2007-2013". *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nurwulansari, Vina Refriana. 2015. "Pengaruh Pendidikan, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Tingkat Pendapatan terhadap Kesenjangan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2013". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Pradnyadewi, Diah dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2017. "Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap

- Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali”. *Jurnal. Universitas Udayana*.
- Prasetyo, Eko. 2016. “Dampak Investasi Pendidikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Wilayah Kedungsepur)”. *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor.
- Pujoalwanto, Basuki. 2014. *Perekonomian Indonesia: tinjauan historis, teoritis, dan empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Puspitarani, Endah. 2016. “Analisis Pengaruh Aglomerasi, Tenaga Kerja, dan ICOR terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di DIY periode 2000-2013 (Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah)”. *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Putri, Yosi Eka, dkk.. 2013. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia”. *Jurnal*.
- Rubiarko, Sabda Imani. 2013. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2011”. *Jurnal*. Universitas Brawijaya Malang.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis: disertai contoh proposal penelitian bidang ilmu ekonomi dan manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sholikhah, Ni’matush. 2010. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal dan Tingkat Pendidikan terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur”. *Jurnal*. Universitas Negeri Surabaya.
- Spilane James J. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan: proses, masalah, dan dasar kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, Cet. 1.
- Supranto, J. 2005. *Pengantar Statistika*. Yogyakarta: BPFE. Jakarta: Salemba Empat.

- Suwarni. 2016. “Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pengangguran di Kota Makassar 2002-2014”. *Skripsi*. UIN Alauddin Makassar.
- Suyatno. 2013. “Analisis Disparitas Perekonomian di Wilayah Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur) periode 1996-2011”. *Jurnal*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Tambunan, Tulus. 2011. *Perekonomian indonesia: kajian teoritis dan analisis empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael. 1997. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Edisi keenam. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kelima . Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi: Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika: pengantar dan aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Yustika, Ahmad Erani. 2006. *Perekonomian indonesia: deskripsi, preskripsi, dan kebijakan*. Malang: Banyumedia.

LAMPIRAN

TELAAH PUSTAKA

No	Penulis dan Tahun	Sumber Referensi	Judul	Variabel dan Alat Analisis	Kesimpulan Hasil
1	Sabda Imani Rubiarko 2013	Jurnal (UNBRAW)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur	Pengangguran terbuka, APK, aglomerasi produksi dan konsumsi Regresi linier berganda	Pengangguran terbuka secara signifikansi dinyatakan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disparitas pendapatan di Jawa Timur dan memiliki hubungan negatif dengan disparitas pendapatan, Angka partisipasi kasar (APK) secara signifikan tidak menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pendapatan di Jawa Timur, Aglomerasi produksi dan konsumsi secara signifikan terbukti menjadi faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan di Jawa Timur, terdapat hubungan positif antara aglomerasi produksi dengan disparitas, Sedangkan untuk aglomerasi konsumsi memiliki hubungan negatif dengan disparitas pendapatan.
2	Ani Lurlaili 2016	Skripsi (UNY)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa tahun 2007-2013.	Ketimpangan distribusi pendapatan, PDRB perkapita, Populasi penduduk, Tingkat pengangguran terbuka, Derajat desentralisasi fiskal.	Indeks Gini yang dijadikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa berada dalam kategori ketimpangan sedang. Hasil regresi menunjukkan ketimpangan pendapatan di pulau Jawa selama tahun 2007-2013 dipengaruhi oleh PDRB perkapita, Populasi penduduk, dan TPT. Ketiga faktor tersebut berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi

				Analisis regresi data panel.	ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa. Populasi penduduk merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di pulau Jawa dengan nilai koefisien 0,656654 pada taraf signifikan 5 %. Secara simultan faktor PDRB perkapita, Populasi penduduk, TPT dan Derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa.
3	Susi Lestari 2015	Jurnal (UNEJ)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur tahun 2008-2012.	Pertumbuhan ekonomi, Inflasi, Jumlah penduduk, Ketimpangan pendapatan. Analisis regresi linier berganda dengan model panel data yang diturunkan dari teori Indeks Williamson.	Ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2008-2012 berkisar antara 0,07 sampai dengan 0,39. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
4	Nita Tri Hartini 2017	Skripsi (UNY)	Pengaruh PDRB perkapita, investasi, dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di provinsi DIY tahun 2011-2015	PDRB per kapita, investasi, IPM, ketimpangan pendapatan Regresi Data Panel	Seluruh variabel penelitian berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan. Secara parsial variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sementara investasi dan IPM berpengaruh negatif dan

					signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
5	Lia Maharani Fadilla 2009	Skripsi (USU)	Analisis ketimpangan pendapatan antar Kabupaten pemekaran di Sumatra Utara	Ketimpangan pendapatan, jumlah penduduk, PDRB, dan pengeluaran pemerintah Regresi Data Panel	Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten pemekaran di Sumatra Utara. Sedangkan variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten pemekaran di Sumatra Utara.
6	Muara Nangarumba 2015	Jurnal (UNBRAW)	Pengaruh struktur ekonomi, upah minimum provinsi, belanja modal, dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia tahun 2005-2014	PDRB sektor industri, PDRB sektor pertanian, PDRB sektor jasa, upah minimum provinsi, belanja modal, kredit investasi, dan ketimpangan pendapatan. Regresi data panel.	PDRB sektor pertanian, PDRB sektor jasa, UMP, belanja modal, kredit investasi berhubungan negatif dengan besaran ketimpangan pendapatan. PDRB sektor industri merupakan satu-satunya variabel yang berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan.
7	Emi Nuraini 2017	Jurnal (UNESA)	Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap disparitas pendapatan di wilayah Gerbangkertosusilo	Pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan disparitas pendapatan. Regresi data panel	Secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan Gerbangkertosusilo dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan Gerbangkertosusilo. Sedang secara simultan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap

					disparitas pendapatan Gerbangkertosusilo.
8	Ni'matush Sholikhah 2010	Jurnal (UNESA)	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, penanaman modal dan tingkat pendidikan terhadap disparitas pendapatan di provinsi Jawa Timur	<p>Pertumbuhan ekonomi, penanaman modal, tingkat pendidikan, dan disparitas pendapatan.</p> <p>Model analisis yang digunakan untuk mengetahui disparitas pendapatan adalah indeks williamson dan untuk mengetahui pengaruh sejumlah variabel terhadap disparitas pendapatan digunakan data time series.</p>	<p>Hasil dari IW dari tahun 2001-2010 di Jawa Timur menunjukkan angka diatas satu. Variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan, variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN per kapita) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan, variabel Penanaman Modal Asing (PMA per kapita) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan, dan variabel tingkat pendidikan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2001-2010. Sedang variabel pertumbuhan ekonomi, penanaman modal (PMDN per kapita dan PMA per kapita) dan tingkat pendidikan (rasio tingkat pendidikan SD dan rasio tingkat pendidikan SLTA) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2001-2010.</p>

DATA PENELITIAN PDRB (JUTA RUPIAH)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Provinsi Jawa Tengah	623.224.621,33	658.003.645,36	690.461.017,10	726.652.111,09	763.219.714,00	805.043.118,61
Kabupaten Cilacap	75.099.089,89	78.156.818,82	79.702.237,61	81.022.670,26	83.391.500,18	88.347.606,68
Kabupaten Banyumas	23.016.943,39	24.538.595,63	25.982.158,22	27.793.138,47	29.367.687,40	31.164.876,40
Kabupaten Purbalingga	10.858.631,52	11.474.221,22	12.138.445,34	12.778.311,23	13.397.712,78	14.125.812,26
Kabupaten Banjarnegara	9.439.359,00	9.952.403,66	10.473.363,43	11.043.083,01	11.629.845,85	12.266.046,35
Kabupaten Kebumen	12.311.421,83	13.068.985,50	13.707.057,24	14.333.333,50	15.163.091,84	16.115.554,01
Kabupaten Purworejo	8.513.490,56	8.993.814,30	9.406.242,93	9.870.969,95	10.312.937,79	10.866.645,98
Kabupaten Wonosobo	9.005.925,54	9.489.550,46	9.935.905,32	10.333.757,05	10.828.168,68	11.353.869,94
Kabupaten Magelang	14.363.230,57	15.323.039,48	16.071.142,55	17.020.755,61	17.936.288,38	18.838.351,97
Kabupaten Boyolali	13.721.701,47	14.592.026,26	15.369.974,36	16.266.498,68	17.148.350,76	18.160.983,95
Kabupaten Klaten	17.002.049,66	18.071.350,51	19.102.402,71	20.241.429,01	21.424.522,36	22.558.976,15
Kabupaten Sukoharjo	16.357.221,65	17.319.638,62	18.342.247,26	19.401.889,44	20.449.009,84	21.612.078,19
Kabupaten Wonogiri	13.310.571,10	13.786.711,34	14.605.088,22	15.303.280,47	16.107.795,17	16.977.198,56
Kabupaten Karanganyar	16.393.788,72	17.205.063,88	18.219.456,66	19.256.516,28	20.262.444,42	21.286.287,14
Kabupaten Sragen	15.832.557,66	16.870.231,27	17.902.104,86	19.102.181,74	20.169.824,79	21.390.871,20
Kabupaten Grobogan	12.766.021,74	13.172.711,96	13.842.047,14	14.474.728,93	15.064.456,66	15.962.619,43
Kabupaten Blora	10.149.079,63	10.597.723,01	11.116.865,90	11.712.504,85	12.227.201,29	12.882.587,70
Kabupaten Rembang	8.373.546,87	8.808.302,78	9.277.163,23	9.780.750,39	10.284.274,36	10.850.269,20
Kabupaten Pati	18.782.546,64	19.893.325,24	21.072.328,70	22.329.693,98	23.365.213,99	24.752.325,07
Kabupaten Kudus	52.933.496,31	55.175.794,89	57.440.810,51	59.944.556,52	62.600.680,87	65.041.047,55
Kabupaten Jepara	13.347.321,26	14.004.325,03	14.824.995,87	15.623.738,87	16.374.715,21	17.200.365,92

Kabupaten Demak	11.647.735,65	12.275.702,69	12.823.227,04	13.499.226,47	14.078.419,80	14.913.837,51
Kabupaten Semarang	21.572.136,87	22.925.456,80	24.306.718,35	25.758.121,08	27.264.112,96	28.769.677,95
Kabupaten Temanggung	9.710.199,27	10.301.569,79	10.740.983,02	11.299.342,97	11.867.679,59	12.486.494,54
Kabupaten Kendal	18.798.278,37	20.032.434,32	21.075.717,33	22.386.123,50	23.536.834,39	24.771.543,49
Kabupaten Batang	9.447.328,38	10.025.044,65	10.488.456,63	11.104.696,78	11.693.897,06	12.327.739,23
Kabupaten Pekalongan	10.254.315,35	10.834.201,09	11.354.849,90	12.034.805,89	12.630.368,82	13.234.564,04
Kabupaten Pemalang	11.282.196,10	11.847.199,06	12.477.235,25	13.172.063,61	13.898.669,42	14.673.696,23
Kabupaten Tegal	15.106.509,91	16.071.820,41	16.912.249,74	18.050.291,97	18.958.841,04	19.992.675,45
Kabupaten Brebes	20.158.107,77	21.498.422,48	22.482.262,67	23.812.056,92	25.074.171,51	26.572.834,89
Kota Magelang	4.010.718,18	4.255.662,21	4.484.268,08	4.755.092,20	4.992.112,82	5.247.341,27
Kota Surakarta	21.469.551,30	22.848.439,42	24.123.781,59	25.631.681,32	26.984.358,61	28.453.493,87
Kota Salatiga	5.845.475,81	6.230.219,49	6.574.907,26	6.989.045,50	7.378.042,82	7.759.181,62
Kota Semarang	80.824.099,97	86.142.966,70	91.282.029,07	96.985.402,04	103.109.874,91	109.088.689,61
Kota Pekalongan	4.624.260,08	4.878.332,22	5.151.813,52	5.456.196,88	5.755.282,26	6.043.095,73
Kota Tegal	6.895.713,33	7.341.540,16	7.650.479,56	8.084.175,73	8.491.325,37	8.953.879,56

DATA PENELITIAN IPM

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Provinsi Jawa Tengah	66.08	66.64	67.21	68.02	68.78	69.49
Kabupaten Cilacap	64.18	64.73	65.72	66.80	67.25	67.77
Kabupaten Banyumas	66.87	67.45	68.06	68.55	69.25	69.89
Kabupaten Purbalingga	63.61	64.33	64.94	65.53	66.23	67.03
Kabupaten Banjarnegara	60.70	61.58	62.29	62.84	63.15	64.73
Kabupaten Kebumen	63.08	64.05	64.47	64.86	65.67	66.87
Kabupaten Purworejo	68.16	69.11	69.40	69.77	70.12	70.37
Kabupaten Wonosobo	62.50	63.07	64.18	64.57	65.20	65.70
Kabupaten Magelang	63.28	64.16	64.75	65.86	66.35	67.13
Kabupaten Boyolali	68.76	69.14	69.51	69.81	70.34	71.74
Kabupaten Klaten	70.76	71.16	71.71	72.42	73.19	73.81
Kabupaten Sukoharjo	71.53	72.34	72.81	73.22	73.76	74.53
Kabupaten Wonogiri	63.90	64.75	65.75	66.40	66.77	67.76
Kabupaten Karanganyar	70.31	71	72.26	73.33	73.89	74.26
Kabupaten Sragen	67.67	68.12	68.91	69.95	70.52	71.10
Kabupaten Grobogan	64.56	65.41	66.39	67.43	67.77	68.05
Kabupaten Blora	63.02	63.88	64.70	65.37	65.84	66.22
Kabupaten Rembang	64.53	65.36	66.03	66.84	67.40	68.18
Kabupaten Pati	65.13	65.71	66.13	66.47	66.99	68.51
Kabupaten Kudus	69.22	69.89	70.57	71.58	72	72.72
Kabupaten Jepara	66.76	67.63	68.45	69.11	69.61	70.02
Kabupaten Demak	66.02	66.84	67.55	68.38	68.95	69.75
Kabupaten Semarang	69.58	70.35	70.88	71.29	71.65	71.89
Kabupaten Temanggung	63.08	64.14	64.91	65.52	65.97	67.07
Kabupaten Kendal	66.23	66.96	67.55	67.98	68.46	69.57

Kabupaten Batang	61.64	62.59	63.09	63.60	64.07	65.46
Kabupaten Pekalongan	63.75	64.72	65.33	66.26	66.98	67.40
Kabupaten Pemalang	58.64	59.66	60.78	61.81	62.35	63.70
Kabupaten Tegal	61.14	61.97	62.67	63.50	64.10	65.04
Kabupaten Brebes	59.49	60.51	60.92	61.87	62.55	63.18
Kota Magelang	73.99	74.47	75	75.29	75.79	76.39
Kota Surakarta	77.45	78	78.44	78.89	79.34	80.14
Kota Salatiga	78.35	78.76	79.10	79.37	79.98	80.96
Kota Semarang	76.96	77.58	78.04	78.68	79.24	80.23
Kota Pekalongan	68.95	69.54	69.95	70.82	71.53	72.69
Kota Tegal	69.33	70.03	70.68	71.44	72.20	72.96

DATA PENELITIAN ANGKA PARTISIPASI KASAR (PERSEN)

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Cilacap	59,72	60,71	62,77	79,69	82,63	75,2
Kabupaten Banyumas	67,48	65,93	75,63	76,32	84,04	80,07
Kabupaten Purbalingga	61,13	58,92	45,63	36,81	52,47	75,29
Kabupaten Banjarnegara	52,31	45,96	50,11	56,32	62,71	83,9
Kabupaten Kebumen	74,81	85,5	84,78	67,99	78,15	86,42
Kabupaten Purworejo	81,51	101,43	78,69	72,52	75,55	82,89
Kabupaten Wonosobo	40,12	48,77	52,85	38,4	47,22	53,23
Kabupaten Magelang	51,7	60,22	69,3	53,34	65,21	69,6
Kabupaten Boyolali	74,18	81,58	69,63	75,39	95,43	93,37
Kabupaten Klaten	88,55	80,46	97,16	96,26	100,8	104,7
Kabupaten Sukoharjo	76,35	78,82	69,29	89,01	94,2	101,2
Kabupaten Wonogiri	65,1	71,89	71,38	62,28	78,76	91,32
Kabupaten Karanganyar	76,04	83,01	78,55	64,91	79,21	94,01
Kabupaten Sragen	91,15	86,95	85,18	73,81	90,98	88,55
Kabupaten Grobogan	44,5	57,2	68,31	51,29	60,38	84,88
Kabupaten Blora	61,79	59,73	61,38	67,55	79,83	99,87
Kabupaten Rembang	53,76	68,45	48,92	61,38	73,13	79,04
Kabupaten Pati	62,94	61,21	72,65	63,52	82,31	76,67
Kabupaten Kudus	63,55	76,54	77,94	61,1	70,98	84,42
Kabupaten Jepara	43,21	47,93	74,56	66,6	62,85	74,51
Kabupaten Demak	52,65	54,48	75,59	69,36	83,46	88,92
Kabupaten Semarang	70,12	61,74	72,53	63,25	63,97	81,98
Kabupaten Temanggung	45,91	48,7	49,26	48,55	64,01	68,42
Kabupaten Kendal	57,09	57,34	62,4	77,96	86,47	99,75

Kabupaten Batang	54,39	51,44	53,67	43,86	54,74	77,32
Kabupaten Pekalongan	42,07	54,4	48,12	56,05	61,69	60,74
Kabupaten Pemalang	53,12	38,37	47,18	56,05	74,23	73,29
Kabupaten Tegal	50,18	69,58	59,85	55,94	70,9	79,46
Kabupaten Brebes	41,07	44,58	51,1	55,18	67,7	65,92
Kota Magelang	80,51	77,55	74,91	85,59	92,16	90,76
Kota Surakarta	92,17	90,77	65,4	65,1	71,25	100,9
Kota Salatiga	84,43	76,32	71,01	78,23	82,75	83,34
Kota Semarang	83,01	77,81	78,9	65,16	67,39	91,34
Kota Pekalongan	47	52,58	54,02	44,11	62,45	81,68
Kota Tegal	66,95	71,33	69,65	65,84	85,77	113,6
JAWA TENGAH	63,16	65,95	66,52	64,13	74,45	83,90

DATA PENELITIAN POPULASI PENDUDUK

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PROVINSI JAWA TENGAH	32443886	32725378	32998692	33264339	33522663	33774141
Kabupaten Cilacap	1644927	1655796	1666163	1676089	1685573	1694593
Kabupaten Banyumas	1557667	1574001	1590011	1605579	1620918	1635803
Kabupaten Purbalingga	850774	860596	870276	879880	889214	898430
Kabupaten Banjarnegara	870503	877207	883694	889921	895986	901814
Kabupaten Kebumen	1161706	1167092	1172036	1176722	1181006	1184938
Kabupaten Purworejo	696525	699718	702699	705483	708038	710435
Kabupaten Wonosobo	756094	760765	765189	769318	773280	777116
Kabupaten Magelang	1184091	1196917	1209375	1221681	1233695	1245482
Kabupaten Boyolali	932193	938999	945534	951817	957857	963669
Kabupaten Klaten	1131913	1137909	1143633	1148994	1154040	1158787
Kabupaten Sukoharjo	825887	833933	841771	849506	856937	864245
Kabupaten Wonogiri	930422	934689	938641	942377	945817	948976
Kabupaten Karanganyar	814907	823486	831916	840171	848255	856181
Kabupaten Sragen	859716	864029	868105	871989	875600	878983
Kabupaten Grobogan	1311009	1319775	1328197	1336304	1343960	1351338
Kabupaten Blora	831093	835781	840208	844444	848369	852088
Kabupaten Rembang	592492	598122	603582	608903	614087	619095
Kabupaten Pati	1193214	1201760	1210025	1218016	1225594	1232912
Kabupaten Kudus	779192	789939	800397	810810	821136	831343

Kabupaten Jepara	1100009	1117847	1135574	1153213	1170797	1188311
Kabupaten Demak	1057821	1070278	1082472	1094472	1106328	1117901
Kabupaten Semarang	933009	946784	960477	974092	987557	1000922
Kabupaten Temanggung	709979	717472	724810	731911	738915	745778
Kabupaten Kendal	902007	910518	918763	926812	934643	942280
Kabupaten Batang	708193	715494	722634	729616	736397	743135
Kabupaten Pekalongan	840199	847379	854287	861082	867573	873972
Kabupaten Pemalang	1263271	1269077	1274475	1279596	1284236	1288566
Kabupaten Tegal	1396982	1403425	1409406	1415009	1420132	1424890
Kabupaten Brebes	1736526	1746529	1756196	1764648	1773379	1781555
Kota Magelang	118413	118957	119523	119935	120373	120779
Kota Surakarta	500173	502866	505413	507825	510077	512207
Kota Salatiga	170801	173402	176031	178594	181193	183828
Kota Semarang	1560167	1588408	1616596	1644800	1672999	1701172
Kota Pekalongan	281991	285026	287978	290870	293704	296533
Kota Tegal	240020	241402	242605	243860	244998	246084

DATA PENELITIAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (PERSEN)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PROVINSI JAWA TENGAH	6.21	7.07	5.61	6.01	5.68	4.99
Kabupaten Cilacap	9.75	10.82	7.29	6.68	5.65	8.01
Kabupaten Banyumas	7.37	6.61	5.11	5.45	5.37	6.37
Kabupaten Purbalingga	3.82	5.10	5.02	5.63	5.13	4.84
Kabupaten Banjarnegara	3.10	4.97	3.69	4.16	4.06	5.05
Kabupaten Kebumen	8.02	4.73	3.58	3.52	3.25	4.14
Kabupaten Purworejo	3.40	5.30	3.20	5.15	5.10	4.01
Kabupaten Wonosobo	4.04	4.92	5.21	5.82	5.34	4.47
Kabupaten Magelang	2.97	6.83	4.38	6.13	7.45	5.16
Kabupaten Boyolali	3.90	5.81	4.43	5.44	4.95	2.03
Kabupaten Klaten	4.50	7.63	3.70	5.34	4.75	2.51
Kabupaten Sukoharjo	7.40	6.27	6.10	5.98	4.60	4.52
Kabupaten Wonogiri	4.70	3.82	3.46	3.61	3.45	3.07
Kabupaten Karanganyar	6.62	5.78	5.82	3.84	3.54	3.60
Kabupaten Sragen	4.09	8.43	5.88	5.63	6.04	4.51
Kabupaten Grobogan	4.60	5.33	4.20	6.10	4.25	5.22
Kabupaten Blora	5.49	6.90	4.75	6.23	4.30	4.68
Kabupaten Rembang	4.89	7.22	5.75	5.97	5.23	4.51
Kabupaten Pati	6.22	11.17	11.98	7.29	6.37	4.43
Kabupaten Kudus	6.22	8.32	5.89	8.07	5.03	5.04
Kabupaten Jepara	4.56	5.48	4.29	6.34	5.09	3.12

Kabupaten Demak	5.69	5.03	8.40	7.08	5.17	6.02
Kabupaten Semarang	6.25	6.16	4.87	3.90	4.38	2.57
Kabupaten Temanggung	3.60	3.54	3.39	4.87	3.19	1.50
Kabupaten Kendal	5.57	6.54	6.31	6.43	6.15	7.07
Kabupaten Batang	6.48	6.66	5.88	7.02	7.42	4.56
Kabupaten Pekalongan	4.04	6.91	5.08	4.78	6.03	5.10
Kabupaten Pemalang	11.45	7.37	4.85	6.48	7.44	6.53
Kabupaten Tegal	7.48	10.59	6.12	6.89	8.47	9.52
Kabupaten Brebes	8.21	11.08	8.22	9.61	9.53	6.49
Kota Magelang	13.28	11.51	8.99	6.75	7.38	6.43
Kota Surakarta	8.73	7.70	6.29	7.22	6.16	4.53
Kota Salatiga	10.22	9.02	6.84	6.21	4.46	6.43
Kota Semarang	8.98	7.65	6.01	6.02	7.76	5.77
Kota Pekalongan	7	8.06	7.67	5.28	5.42	4.10
Kota Tegal	14.22	9.77	8.75	9.32	9.20	8.06

DATA INDEKS GINI

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Provinsi Jawa Tengah	0,34	0,38	0,38	0,39	0,38	0,38
Kabupaten Cilacap	0.25	0.30	0.32	0.37	0.34	0.33
Kabupaten Banyumas	0.35	0.35	0.34	0.36	0.32	0.40
Kabupaten Purbalingga	0.24	0.28	0.33	0.32	0.30	0.33
Kabupaten Banjarnegara	0.26	0.36	0.33	0.39	0.34	0.32
Kabupaten Kebumen	0.23	0.34	0.35	0.31	0.28	0.30
Kabupaten Purworejo	0.29	0.36	0.31	0.34	0.38	0.34
Kabupaten Wonosobo	0.25	0.45	0.38	0.34	0.35	0.37
Kabupaten Magelang	0.25	0.32	0.33	0.34	0.34	0.36
Kabupaten Boyolali	0.27	0.36	0.38	0.40	0.30	0.34
Kabupaten Klaten	0.25	0.32	0.33	0.34	0.36	0.35
Kabupaten Sukoharjo	0.30	0.33	0.35	0.34	0.35	0.35
Kabupaten Wonogiri	0.29	0.35	0.32	0.34	0.33	0.31
Kabupaten Karanganyar	0.29	0.37	0.40	0.33	0.36	0.33
Kabupaten Sragen	0.28	0.35	0.37	0.35	0.33	0.37
Kabupaten Grobogan	0.28	0.32	0.35	0.34	0.34	0.29
Kabupaten Blora	0.26	0.33	0.38	0.41	0.39	0.34
Kabupaten Rembang	0.19	0.27	0.33	0.32	0.33	0.30
Kabupaten Pati	0.24	0.29	0.29	0.30	0.31	0.35
Kabupaten Kudus	0.24	0.35	0.34	0.34	0.37	0.33

Kabupaten Jepara	0.20	0.32	0.35	0.33	0.31	0.32
Kabupaten Demak	0.24	0.31	0.34	0.33	0.32	0.28
Kabupaten Semarang	0.28	0.33	0.36	0.31	0.31	0.32
Kabupaten Temanggung	0.28	0.38	0.35	0.34	0.38	0.38
Kabupaten Kendal	0.27	0.37	0.36	0.32	0.34	0.35
Kabupaten Batang	0.28	0.28	0.31	0.30	0.29	0.28
Kabupaten Pekalongan	0.23	0.28	0.28	0.27	0.29	0.31
Kabupaten Pemalang	0.20	0.26	0.25	0.24	0.28	0.31
Kabupaten Tegal	0.30	0.28	0.32	0.32	0.33	0.32
Kabupaten Brebes	0.23	0.33	0.32	0.31	0.32	0.29
Kota Magelang	0.31	0.34	0.37	0.33	0.36	0.34
Kota Surakarta	0.34	0.33	0.37	0.35	0.36	0.35
Kota Salatiga	0.35	0.34	0.35	0.37	0.35	0.38
Kota Semarang	0.32	0.35	0.35	0.35	0.31	0.33
Kota Pekalongan	0.28	0.31	0.33	0.32	0.34	0.32
Kota Tegal	0.24	0.32	0.33	0.32	0.31	0.35

DATA PENELITIAN REGRESI PANEL

Kabupaten_Kota	Tahun	PDRB	IPM	APK	POP	TPT	GINI
Kabupaten Cilacap	2010	75099089.89	64.18	59.72	1644927	9.75	0.25
Kabupaten Cilacap	2011	78156818.82	64.73	60.71	1655796	10.82	0.30
Kabupaten Cilacap	2012	79702237.61	65.72	62.77	1666163	7.29	0.32
Kabupaten Cilacap	2013	81022670.26	66.80	79.69	1676089	6.68	0.37
Kabupaten Cilacap	2014	83391500.18	67.25	82.63	1685573	5.65	0.34
Kabupaten Cilacap	2015	88347606.68	67.77	75.20	1694593	8.01	0.33
Kabupaten Banyumas	2010	23016943.39	66.87	67.48	1557667	7.37	0.34
Kabupaten Banyumas	2011	24538595.63	67.45	65.93	1574001	6.61	0.35
Kabupaten Banyumas	2012	25982158.22	68.06	75.63	1590011	5.11	0.34
Kabupaten Banyumas	2013	27793138.47	68.55	76.32	1605579	5.45	0.36
Kabupaten Banyumas	2014	29367687.40	69.25	84.04	1620918	5.37	0.32
Kabupaten Banyumas	2015	31164876.40	69.89	80.07	1635803	6.37	0.40
Kabupaten Purbalingga	2010	10858631.52	63.61	61.13	850774	3.82	0.24
Kabupaten Purbalingga	2011	11474221.22	64.33	58.92	860596	5.1	0.28
Kabupaten Purbalingga	2012	12138445.34	64.94	45.63	870276	5.02	0.33
Kabupaten Purbalingga	2013	12778311.23	65.53	36.81	879880	5.63	0.32
Kabupaten Purbalingga	2014	13397712.78	66.23	52.47	889214	5.13	0.30
Kabupaten Purbalingga	2015	14125812.26	67.03	75.29	898430	4.84	0.33
Kabupaten Banjarnegara	2010	9439359.00	60.70	52.31	870503	3.1	0.26
Kabupaten Banjarnegara	2011	9952403.66	61.58	45.96	877207	4.97	0.35
Kabupaten Banjarnegara	2012	10473363.43	62.29	50.11	883694	3.69	0.33
Kabupaten Banjarnegara	2013	11043083.01	62.84	56.32	889921	4.16	0.39
Kabupaten Banjarnegara	2014	11629845.85	63.15	62.71	895986	4.06	0.34
Kabupaten Banjarnegara	2015	12266046.35	64.73	83.90	901814	5.05	0.32
Kabupaten Kebumen	2010	12311421.83	63.08	74.81	1161706	8.02	0.23
Kabupaten Kebumen	2011	13068985.50	64.05	85.50	1167092	4.73	0.33
Kabupaten Kebumen	2012	13707057.24	64.47	84.78	1172036	3.58	0.35
Kabupaten Kebumen	2013	14333333.50	64.86	67.99	1176722	3.52	0.31
Kabupaten Kebumen	2014	15163091.84	65.67	78.15	1181006	3.25	0.28
Kabupaten Kebumen	2015	16115554.01	66.87	86.42	1184938	4.14	0.30
Kabupaten Purworejo	2010	8513490.56	68.16	81.51	695525	3.4	0.29
Kabupaten Purworejo	2011	8993814.30	69.11	101.43	699718	5.3	0.35
Kabupaten Purworejo	2012	9406242.93	69.40	78.69	702699	3.2	0.31
Kabupaten Purworejo	2013	9870969.95	69.77	72.52	705483	5.15	0.34

Kabupaten Purworejo	2014	10312937.79	70.12	75.55	708038	5.1	0.38
Kabupaten Purworejo	2015	10866645.98	70.37	82.89	710435	4.01	0.34
Kabupaten Wonosobo	2010	9005925.54	62.50	40.12	756094	4.04	0.25
Kabupaten Wonosobo	2011	9489550.46	63.07	48.77	760765	4.92	0.34
Kabupaten Wonosobo	2012	9935905.32	64.18	52.85	765189	5.21	0.38
Kabupaten Wonosobo	2013	10333757.05	64.57	38.40	769318	5.82	0.34
Kabupaten Wonosobo	2014	10828168.68	65.20	47.22	773280	5.34	0.35
Kabupaten Wonosobo	2015	11353869.94	65.70	53.23	777116	4.47	0.37
Kabupaten Magelang	2010	14363230.57	63.28	51.70	1184091	2.97	0.25
Kabupaten Magelang	2011	15323039.48	64.16	60.22	1196917	6.63	0.31
Kabupaten Magelang	2012	16071142.55	64.75	69.30	1209375	4.38	0.33
Kabupaten Magelang	2013	17020755.61	65.86	53.34	1221681	6.13	0.34
Kabupaten Magelang	2014	17936288.38	66.35	65.21	1233695	7.45	0.34
Kabupaten Magelang	2015	18838351.97	67.13	69.60	1245482	5.16	0.36
Kabupaten Boyolali	2010	13721701.47	68.76	74.18	932193	3.9	0.27
Kabupaten Boyolali	2011	14592026.26	69.14	81.58	938999	5.81	0.36
Kabupaten Boyolali	2012	15369974.36	69.51	69.63	945534	4.43	0.38
Kabupaten Boyolali	2013	16266498.68	69.81	75.39	951817	5.44	0.40
Kabupaten Boyolali	2014	17148350.76	70.34	95.43	957857	4.95	0.30
Kabupaten Boyolali	2015	18160983.95	71.74	93.37	963669	2.03	0.34
Kabupaten Klaten	2010	17002049.66	70.76	88.55	1131913	4.5	0.25
Kabupaten Klaten	2011	18071350.51	71.16	80.46	1137909	7.63	0.31
Kabupaten Klaten	2012	19102402.71	71.71	97.16	1143633	3.7	0.33
Kabupaten Klaten	2013	20241429.01	72.42	96.26	1148994	5.34	0.34
Kabupaten Klaten	2014	21424522.36	73.19	100.76	1154040	4.75	0.36
Kabupaten Klaten	2015	22558976.15	73.81	104.73	1158787	2.51	0.35
Kabupaten Sukoharjo	2010	16357221.65	71.53	76.35	825887	7.4	0.30
Kabupaten Sukoharjo	2011	17319638.62	72.34	78.82	833933	6.27	0.32
Kabupaten Sukoharjo	2012	18342247.26	72.81	69.29	841771	6.1	0.35
Kabupaten Sukoharjo	2013	19401889.44	73.22	89.01	849506	5.98	0.34
Kabupaten Sukoharjo	2014	20449009.84	73.76	94.20	856937	4.6	0.35
Kabupaten Sukoharjo	2015	21612078.19	74.53	101.17	864245	4.52	0.35
Kabupaten Wonogiri	2010	13310571.10	63.90	65.10	930422	4.7	0.29
Kabupaten Wonogiri	2011	13786711.34	64.75	71.89	934689	3.82	0.35
Kabupaten Wonogiri	2012	14605088.22	65.75	71.38	938641	3.46	0.32
Kabupaten Wonogiri	2013	15303280.47	66.40	62.28	942377	3.61	0.34
Kabupaten Wonogiri	2014	16107795.17	66.77	78.76	945817	3.45	0.33
Kabupaten Wonogiri	2015	16977198.56	67.76	91.32	948976	3.07	0.31
Kabupaten Karanganyar	2010	16393788.72	70.31	76.04	814907	6.62	0.29
Kabupaten Karanganyar	2011	17205063.88	71	83.01	823486	5.78	0.37

Kabupaten Karanganyar	2012	18219456.66	72.26	78.55	831916	5.82	0.40
Kabupaten Karanganyar	2013	19256516.28	73.33	64.91	840171	3.84	0.33
Kabupaten Karanganyar	2014	20262444.42	73.89	79.21	848255	3.54	0.36
Kabupaten Karanganyar	2015	21286287.14	74.26	94.01	856181	3.6	0.33
Kabupaten Sragen	2010	15832557.66	67.67	91.15	859716	4.09	0.28
Kabupaten Sragen	2011	16870231.27	68.12	86.95	864029	8.43	0.34
Kabupaten Sragen	2012	17902104.86	68.91	85.18	868105	5.88	0.37
Kabupaten Sragen	2013	19102181.74	69.95	73.81	871989	5.63	0.35
Kabupaten Sragen	2014	20169824.79	70.52	90.98	875600	6.04	0.33
Kabupaten Sragen	2015	21390871.20	71.10	88.55	878983	4.51	0.37
Kabupaten Grobogan	2010	12766021.74	64.56	44.50	1311009	4.6	0.28
Kabupaten Grobogan	2011	13172711.96	65.41	57.20	1319775	5.33	0.31
Kabupaten Grobogan	2012	13842047.14	66.39	68.31	1328197	4.2	0.35
Kabupaten Grobogan	2013	14474728.93	67.43	51.29	1336304	6.1	0.34
Kabupaten Grobogan	2014	15064456.66	67.77	60.38	1343960	4.25	0.34
Kabupaten Grobogan	2015	15962619.43	68.05	84.88	1351338	5.22	0.29
Kabupaten Blora	2010	10149079.63	63.02	61.79	831093	5.49	0.26
Kabupaten Blora	2011	10597723.01	63.88	59.73	835781	6.9	0.33
Kabupaten Blora	2012	11116865.90	64.70	61.38	840208	4.75	0.38
Kabupaten Blora	2013	11712504.85	65.37	67.55	844444	6.23	0.41
Kabupaten Blora	2014	12227201.29	65.84	79.83	848369	4.3	0.39
Kabupaten Blora	2015	12882587.70	66.22	99.87	852088	4.68	0.34
Kabupaten Rembang	2010	8373546.87	64.53	53.76	592492	4.89	0.20
Kabupaten Rembang	2011	8808302.78	65.36	68.45	598122	7.22	0.26
Kabupaten Rembang	2012	9277163.23	66.03	48.92	603582	5.75	0.33
Kabupaten Rembang	2013	9780750.39	66.84	61.38	608903	5.97	0.32
Kabupaten Rembang	2014	10284274.36	67.40	73.13	614087	5.23	0.33
Kabupaten Rembang	2015	10850269.20	68.18	79.04	619095	4.51	0.30
Kabupaten Pati	2010	18782546.64	65.13	62.94	1193214	6.22	0.24
Kabupaten Pati	2011	19893325.24	65.71	61.21	1201760	11.17	0.28
Kabupaten Pati	2012	21072328.70	66.13	72.65	1210025	11.98	0.29
Kabupaten Pati	2013	22329693.98	66.47	63.52	1218016	7.29	0.30
Kabupaten Pati	2014	23365213.99	66.99	82.31	1225594	6.37	0.31
Kabupaten Pati	2015	24752325.07	68.51	76.67	1232912	4.43	0.35
Kabupaten Kudus	2010	52933496.31	69.22	63.55	779192	6.22	0.24
Kabupaten Kudus	2011	55175794.89	69.89	76.54	789939	8.32	0.34
Kabupaten Kudus	2012	57440810.51	70.57	77.94	800397	5.89	0.34
Kabupaten Kudus	2013	59944556.52	71.58	61.10	810810	8.07	0.34
Kabupaten Kudus	2014	62600680.87	72	70.98	821136	5.03	0.37
Kabupaten Kudus	2015	65041047.55	72.72	84.42	831343	5.04	0.33

Kabupaten Jepara	2010	13347321.26	66.76	43.21	1100009	4.56	0.20
Kabupaten Jepara	2011	14004325.03	67.63	47.93	1117847	5.48	0.32
Kabupaten Jepara	2012	14824995.87	68.45	74.56	1135574	4.29	0.35
Kabupaten Jepara	2013	15623738.87	69.11	66.60	1153213	6.34	0.33
Kabupaten Jepara	2014	16374715.21	69.61	62.85	1170797	5.09	0.31
Kabupaten Jepara	2015	17200365.92	70.02	74.51	1188311	3.12	0.32
Kabupaten Demak	2010	11647735.65	66.02	52.65	1057821	5.69	0.24
Kabupaten Demak	2011	12275702.69	66.84	54.48	1070278	5.03	0.31
Kabupaten Demak	2012	12823227.04	67.55	75.59	1082472	8.4	0.34
Kabupaten Demak	2013	13499226.47	68.38	69.36	1094472	7.08	0.33
Kabupaten Demak	2014	14078419.80	68.95	83.46	1106328	5.17	0.32
Kabupaten Demak	2015	14913837.51	69.75	88.92	1117901	6.02	0.28
Kabupaten Semarang	2010	21572136.87	69.58	70.12	933009	6.25	0.28
Kabupaten Semarang	2011	22925456.80	70.35	61.74	946784	6.16	0.32
Kabupaten Semarang	2012	24306718.35	70.88	72.53	960477	4.87	0.36
Kabupaten Semarang	2013	25758121.08	71.29	63.25	974092	3.9	0.31
Kabupaten Semarang	2014	27264112.96	71.65	63.97	987557	4.38	0.31
Kabupaten Semarang	2015	28769677.95	71.89	81.98	1000922	2.57	0.32
Kabupaten Temanggung	2010	9710199.27	63.08	45.91	709979	3.6	0.28
Kabupaten Temanggung	2011	10301569.79	64.14	48.70	717472	3.54	0.38
Kabupaten Temanggung	2012	10740983.02	64.91	49.26	724810	3.39	0.35
Kabupaten Temanggung	2013	11299342.97	65.52	48.55	731911	4.87	0.34
Kabupaten Temanggung	2014	11867679.59	65.97	64.01	738915	3.19	0.38
Kabupaten Temanggung	2015	12486494.54	67.07	68.42	745778	1.5	0.38
Kabupaten Kendal	2010	18798278.37	66.23	57.09	902007	5.57	0.27
Kabupaten Kendal	2011	20032434.32	66.96	57.34	910518	6.54	0.36
Kabupaten Kendal	2012	21075717.33	67.55	62.40	918763	6.31	0.36
Kabupaten Kendal	2013	22386123.50	67.98	77.96	926812	6.43	0.32
Kabupaten Kendal	2014	23536834.39	68.46	86.47	934643	6.15	0.34
Kabupaten Kendal	2015	24771543.49	69.57	99.75	942280	7.07	0.35
Kabupaten Batang	2010	9447328.38	61.64	54.39	708193	6.48	0.28
Kabupaten Batang	2011	10025044.65	62.59	51.44	715494	6.66	0.28
Kabupaten Batang	2012	10488456.63	63.09	53.67	722634	5.88	0.31
Kabupaten Batang	2013	11104696.78	63.60	43.86	729616	7.02	0.30
Kabupaten Batang	2014	11693897.06	64.07	54.74	736397	7.42	0.29
Kabupaten Batang	2015	12327739.23	65.46	77.32	743135	4.56	0.28
Kabupaten Pekalongan	2010	10254315.35	63.75	42.07	840199	4.04	0.23
Kabupaten Pekalongan	2011	10834201.09	64.72	54.40	847379	6.91	0.28
Kabupaten Pekalongan	2012	11354849.90	65.33	48.12	854287	5.08	0.28

Kabupaten Pekalongan	2013	12034805.89	66.26	56.05	861082	4.78	0.27
Kabupaten Pekalongan	2014	12630368.82	66.98	61.69	867573	6.03	0.29
Kabupaten Pekalongan	2015	13234564.04	67.40	60.74	873972	5.1	0.31
Kabupaten Pemalang	2010	11282196.10	58.64	53.12	1263271	11.45	0.20
Kabupaten Pemalang	2011	11847199.06	59.66	38.37	1269077	7.37	0.25
Kabupaten Pemalang	2012	12477235.25	60.78	47.18	1274475	4.85	0.25
Kabupaten Pemalang	2013	13172063.61	61.81	56.05	1279596	6.48	0.24
Kabupaten Pemalang	2014	13898669.42	62.35	74.23	1284236	7.44	0.28
Kabupaten Pemalang	2015	14673696.23	63.70	73.29	1288566	6.53	0.31
Kabupaten Tegal	2010	15106509.91	61.14	50.18	1396982	7.48	0.30
Kabupaten Tegal	2011	16071820.41	61.97	69.58	1403425	10.59	0.28
Kabupaten Tegal	2012	16912249.74	62.67	59.85	1409406	6.12	0.32
Kabupaten Tegal	2013	18050291.97	63.50	55.94	1415009	6.89	0.32
Kabupaten Tegal	2014	18958841.04	64.10	70.90	1420132	8.47	0.33
Kabupaten Tegal	2015	19992675.45	65.04	79.46	1424890	9.52	0.32
Kabupaten Brebes	2010	20158107.77	59.49	41.07	1736526	8.21	0.23
Kabupaten Brebes	2011	21498422.48	60.51	44.58	1746529	11.08	0.33
Kabupaten Brebes	2012	22482262.67	60.92	51.10	1756196	8.22	0.32
Kabupaten Brebes	2013	23812056.92	61.87	55.18	1764648	9.61	0.31
Kabupaten Brebes	2014	25074171.51	62.55	67.70	1773379	9.53	0.32
Kabupaten Brebes	2015	26572834.89	63.18	65.92	1781555	6.49	0.29
Kota Magelang	2010	4010718.18	73.99	80.51	118413	13.28	0.31
Kota Magelang	2011	4255662.21	74.47	77.55	118957	11.51	0.34
Kota Magelang	2012	4484268.08	75	74.91	119523	8.99	0.37
Kota Magelang	2013	4755092.20	75.29	85.59	119935	6.75	0.33
Kota Magelang	2014	4992112.82	75.79	92.16	120373	7.38	0.36
Kota Magelang	2015	5247341.27	76.39	90.76	120779	6.43	0.34
Kota Surakarta	2010	21469551.30	77.45	92.17	500173	8.73	0.34
Kota Surakarta	2011	22848439.42	78	90.77	502866	7.7	0.33
Kota Surakarta	2012	24123781.59	78.44	65.40	505413	6.29	0.37
Kota Surakarta	2013	25631681.32	78.89	65.10	507825	7.22	0.35
Kota Surakarta	2014	26984358.61	79.34	71.25	510077	6.16	0.36
Kota Surakarta	2015	28453493.87	80.14	100.93	512207	4.53	0.35
Kota Salatiga	2010	5845475.81	78.35	84.43	170801	10.22	0.35
Kota Salatiga	2011	6230219.49	78.76	76.32	173402	9.02	0.34
Kota Salatiga	2012	6574907.26	79.10	71.01	176031	6.84	0.35
Kota Salatiga	2013	6989045.50	79.37	78.23	178594	6.21	0.37
Kota Salatiga	2014	7378042.82	79.98	82.75	181193	4.46	0.35
Kota Salatiga	2015	7759181.62	80.96	83.34	183828	6.43	0.38
Kota Semarang	2010	80824099.97	76.96	83.01	1560167	8.98	0.32

Kota Semarang	2011	86142966.70	77.58	77.81	1588408	7.65	0.35
Kota Semarang	2012	91282029.07	78.04	78.90	1616596	6.01	0.35
Kota Semarang	2013	96985402.04	78.68	65.16	1644800	6.02	0.35
Kota Semarang	2014	103109874.91	79.24	67.39	1672999	7.76	0.31
Kota Semarang	2015	109088689.61	80.23	91.34	1701172	5.77	0.33
Kota Pekalongan	2010	4624260.08	68.95	47	281991	7	0.28
Kota Pekalongan	2011	4878332.22	69.54	52.58	285026	8.06	0.31
Kota Pekalongan	2012	5151813.52	69.95	54.02	287978	7.67	0.33
Kota Pekalongan	2013	5456196.88	70.82	44.11	290870	5.28	0.32
Kota Pekalongan	2014	5755282.26	71.53	62.45	293704	5.42	0.34
Kota Pekalongan	2015	6043095.73	72.69	81.68	296533	4.1	0.32
Kota Tegal	2010	6895713.33	69.33	66.95	240020	14.22	0.24
Kota Tegal	2011	7341540.16	70.03	71.33	241402	9.77	0.32
Kota Tegal	2012	7650479.56	70.68	69.65	242605	8.75	0.33
Kota Tegal	2013	8084175.73	71.44	65.84	243860	9.32	0.32
Kota Tegal	2014	8491325.37	72.20	85.77	244998	9.2	0.31
Kota Tegal	2015	8953879.56	72.96	113.61	246084	8.06	0.35

STATISTIK DESKRIPTIF DATA PANEL

	PDRB	IPM	APK	POP	TPT	GINI
Mean	20317163	68.36538	69.68633	946324.3	5.992429	0.321238
Median	14749346	67.59000	69.61500	892953.5	5.760000	0.330000
Maximum	1.09E+08	80.96000	113.6100	1781555.	14.22000	0.410000
Minimum	4010718.	58.64000	36.81000	118413.0	1.500000	0.200000
Std. Dev.	19230153	4.783539	15.49280	402023.3	2.072149	0.039885
Skewness	2.812143	0.651861	0.100143	-0.017237	1.003366	-0.658792
Kurtosis	10.56204	3.000401	2.457721	2.792916	4.507421	3.424660
Jarque-Bera	777.1486	14.87231	2.924081	0.385631	55.11881	16.76818
Probability	0.000000	0.000590	0.231763	0.824634	0.000000	0.000228
Sum	4.27E+09	14356.73	14634.13	1.99E+08	1258.410	67.46000
Sum Sq. Dev.	7.73E+16	4782.389	50165.60	3.38E+13	897.4049	0.332478
Observations	210	210	210	210	210	210

UJI SPESIFIKASI MODEL

A. UJI *LIKELIHOOD*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.115302	(34,170)	0.0000
Cross-section Chi-square	126.108503	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: GINI
Method: Panel Least Squares
Date: 01/01/18 Time: 20:14
Sample: 2010 2015
Periods included: 6
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.100501	0.057154	1.758425	0.0802
PDRB	-5.50E-11	1.96E-10	-0.280084	0.7797
IPM	0.003140	0.000866	3.626838	0.0004
APK	0.000311	0.000203	1.529254	0.1278
POP	3.70E-09	9.89E-09	0.374738	0.7082
TPT	-0.002998	0.001218	-2.461759	0.0147
R-squared	0.213013	Mean dependent var		0.321238
Adjusted R-squared	0.193724	S.D. dependent var		0.039885
S.E. of regression	0.035814	Akaike info criterion		-3.792813
Sum squared resid	0.261656	Schwarz criterion		-3.697181
Log likelihood	404.2454	Hannan-Quinn criter.		-3.754153
F-statistic	11.04332	Durbin-Watson stat		1.501969
Prob(F-statistic)	0.000000			

B. UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	51.184643	5	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PDRB	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.1794
IPM	0.021489	0.004960	0.000010	0.0000
APK	-0.000500	0.000224	0.000000	0.0000
POP	0.000000	0.000000	0.000000	0.6678
TPT	0.002571	-0.001977	0.000001	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: GINI

Method: Panel Least Squares

Date: 01/01/18 Time: 20:17

Sample: 2010 2015

Periods included: 6

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.227971	0.259457	-4.732844	0.0000
PDRB	-2.87E-09	1.94E-09	-1.481290	0.1404
IPM	0.021489	0.003373	6.371583	0.0000
APK	-0.000500	0.000249	-2.010240	0.0460
POP	1.67E-07	3.44E-07	0.484319	0.6288
TPT	0.002571	0.001628	1.579160	0.1162

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.568316	Mean dependent var	0.321238
Adjusted R-squared	0.469282	S.D. dependent var	0.039885
S.E. of regression	0.029056	Akaike info criterion	-4.069520
Sum squared resid	0.143526	Schwarz criterion	-3.431976
Log likelihood	467.2996	Hannan-Quinn criter.	-3.811785
F-statistic	5.738623	Durbin-Watson stat	1.826007
Prob(F-statistic)	0.000000		

HASIL REGRESI DATA PANEL

Dependent Variable: GINI
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/01/18 Time: 20:13
 Sample: 2010 2015
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.227971	0.259457	-4.732844	0.0000
PDRB	-2.87E-09	1.94E-09	-1.481290	0.1404
IPM	0.021489	0.003373	6.371583	0.0000
APK	-0.000500	0.000249	-2.010240	0.0460
POP	1.67E-07	3.44E-07	0.484319	0.6288
TPT	0.002571	0.001628	1.579160	0.1162

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.568316	Mean dependent var	0.321238
Adjusted R-squared	0.469282	S.D. dependent var	0.039885
S.E. of regression	0.029056	Akaike info criterion	-4.069520
Sum squared resid	0.143526	Schwarz criterion	-3.431976
Log likelihood	467.2996	Hannan-Quinn criter.	-3.811785
F-statistic	5.738623	Durbin-Watson stat	1.826007
Prob(F-statistic)	0.000000		

CURRICULUM VITAE



A. DATA PRIBADI

Nama	: Fergiawan Avriandaru
Tempat, Tanggal Lahir	: Sleman, 26 April 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Druju Kidul RT01/RW 04, Desa Plosogede, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang
Nomor Telepon	: 0858-6839-4394
Email	: fergiawanavrian@gmail.com
Twitter	: @f_fergiawan
Facebook	: Fergiawan Avriandaru

A. RIWAYAT PENDIDIKAN

2000-2006	: SD Negeri 2 Druju Kab. Magelang
2006-2009	: SMP Negeri 2 Salam Kab. Magelang
2009-2012	: SMA Negeri 1 Ngluwar Kab. Magelang
2013-2018	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Program S1 Ekonomi Syariah